



RENCANA KERJA (RENJA) **KEPOLISIAN RESOR MALANG T.A. 2024**

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Tahapan Rencana Strategis Polres Malang Tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2023 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024. Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polres Malang Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, yaitu: pilar keamanan dalam negeri, pilar pertahanan, pilar keamanan laut, pilar keamanan dan ketertiban, dan pilar keamanan Siber.

Dalam rangka melaksanakan RPJMN IV Tahun 2020-2024, disusunlah RKP Tahun 2024 dengan mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di Tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju, Agar RKP Tahun 2024 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.

Dengan mengemban tugas tersebut, Polri khususnya Polres Malang harus memastikan seluruh rencana pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RKP dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarannya serta mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan melalui integrasi sistem data yang ada.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan sejajar dengan pembangunan Nasional, harus diakui bahwa pembangunan tersebut sudah berjalan namun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat di tengah tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondisifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, sehingga dapat mendukung pembangunan Nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membangun kepemimpinan 2020-2024 akan meneruskan dan mengembangkan kembali berbagai pencapaian kinerja dan kebijakan yang telah berjalan dalam kepemimpinan sebelumnya dengan *tagline* transformasi Polri Presisi yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari POLRI PROMOTER (PROfesional, MODern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya, dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing*). Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat, tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Konsep “Transformasi Menuju Polri yang PRESISI” hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif, yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga akan mentransformasi wajah Polri ke depannya, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan cepat, pemeliharaan kamtibmas yang lebih prediktif, serta penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan masyarakat. Konsep tersebut /dilaksanakan.....

dilaksanakan pada 4 (empat) bidang dan melahirkan serangkaian Program Prioritas yang diuraikan sebagai berikut:

1. TRANSFORMASI ORGANISASI diuraikan ke dalam 4 (empat) program yaitu:
 - a. penataan kelembagaan;
 - b. perubahan sistem dan metode organisasi;
 - c. menjadikan SDM Polri yang unggul di era *police 4.0*;
 - d. perubahan teknologi kepolisian modern (*police 4.0*).
2. TRANSFORMASI OPERASIONAL diuraikan ke dalam 6 (enam) program yaitu:
 - a. pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas;
 - b. peningkatan kinerja penegakan hukum;
 - c. pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC);
 - d. pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - e. menjamin keamanan program prioritas nasional;
 - f. penguatan penanganan konflik sosial.
3. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK diuraikan ke dalam 3 (tiga) program yaitu:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
 - b. mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi;
 - c. pemantapan komunikasi publik.
4. TRANSFORMASI PENGAWASAN dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu
 - a. pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
 - b. penguatan fungsi pengawasan;
 - c. pengawasan oleh masyarakat (*public complaint*).

Polres Malang merupakan bagian dari institusi Polri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di daerah Kabupaten Malang, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada 16 Program Prioritas Kapolri, kebijakan strategis Polri yang terdapat pada Rencana Strategis Polda Jatim dan Rencana Startegis Polres Malang. Selain memperhatikan kebijakan strategis tersebut, Polres Malang juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis daerah, karakteristik wilayah serta arah dan kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Malang sehingga diperoleh formulasi yang tepat dan ideal dalam penyusunan sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi serta kebutuhan ideal Polres Malang pada Tahun 2024.

/Hakekat.....

Hakekat ancaman pada Tahun 2024 diperkirakan akan semakin kompleks, bila dihadapkan dengan perkembangan stabilitas keamanan yang perlu diantisipasi. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk hakikat ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan khususnya di wilayah hukum Polres Malang pada Tahun 2024, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka Kamdagri tentunya harus mampu mendekripsi, mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban yang akan timbul pada Tahun 2024.

Keberhasilan yang dicapai Polres Malang tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Malang dengan didukung oleh Pemerintah Daerah, DPRD TK. II, partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas Kepolisian untuk dapat mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polres Malang oleh pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan tantangan bagi Polres Malang dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

Sejalan dengan capaian keberhasilan tersebut diharapkan dapat membuat Polres Malang semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun Pemerintah baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Malang kepada Polres Malang untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan tersebut sebagai berikut:

1. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
2. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;

3. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
4. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran *Covid-19* dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi harus dilihat dari faktor-faktor Ipolesosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024. Polres Malang merupakan salah satu lembaga Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun program pembangunan baik jangka menengah maupun program tahunan. Penyusunan dokumen program pembangunan tersebut dilakukan secara *bottom-up* melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan Satker jajaran Polres Malang. Implementasi monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Polri dan Zona Integritas dan pengukuran kinerja dengan menggunakan instrumen Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK).

Dalam menjawab tantangan masa kini, pola pendekatan Polisi perlu lebih ditingkatkan dengan pola baru tetap dalam tujuan Reformasi Birokrasi Polri (RBP). Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan. Hal tersebut diharapkan dapat membawa Polres Malang mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya situasi kamtibmas wilayah Polres Malang yang aman dan kondusif, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan asistensi dan supervisi untuk mengetahui hambatannya dan segera dilakukan solusi perbaikan untuk memastikan program berjalan dan mencapai target.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat baik di bidang keamanan maupun bidang pelayanan publik menuju pelayanan prima yang dapat dirasakan secara langsung dan memperoleh apresiasi dari masyarakat.

Kualitas Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024 tercermin dari kualitas kebijakan dan strategi perencanaan yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan upaya dalam bentuk inovasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Polres Malang. Maka dalam menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024 dengan tetap mengimplementasikan 16 Program Prioritas Kapolri guna mendukung tugas pokok dan fungsi dari Sub Satker/ Satwil jajaran Polres Malang.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Malang yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan aspek kehidupan :

1) Regional Jawa Timur

Kondisi geografi wilayah Jawa Timur, sebelah utara berbatasan laut Jawa, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur selat Bali dan sebelah barat Propinsi Jawa Tengah, luas wilayah Jawa Timur 47.803,49 Km² dengan jumlah penduduk ± 40.665.696 jiwa dan sumber daya alam berupa aneka tambang dan hasil hutan, perikanan laut merupakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Potensi gangguan Kamtibmas di Jawa Timur sebagai berikut :

a) bidang geografi

- (1) wilayah Jawa Timur yang terletak di Timur pulau Jawa yang merupakan jalur lintas antara Jawa Barat, DKI, Jawa Timur dan Bali cenderung terjadinya kemacetan lalul lintas pada event hari libur dan hari besar keagamaan;
- (2) wilayah terdapat gunung berapi yang masih beraktivitas vulkanik yang berpotensi terjadi bencana;

/(3) wilayah.....

(3) wilayah Jawa Timur terdiri dari wilayah perairan laut apabila tidak dilakukan pengawasan ketat merupakan kerawanan berbagai kejahatan laut illegal fising dan masuknya pihak asing.

b) bidang demografi

- (1) jumlah penduduk yang cukup padat sebanyak 40,67 juta jiwa dengan heterogenitas yang tinggi memberikan konsekuensi logis terjadi mobilitas orang / barang yang cukup tinggi pula yang berpotensi terjadinya konflik sosial antar warga atau masyarakat;
- (2) sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat- pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Surabaya dan Malang;
- (3) heterogenitas penduduk tinggi dan struktur usia muda semakin dominan sehingga berdampak terjadinya ledakan penduduk serta peningkatan jumlah pengangguran yang tidak disertai dengan peningkatan sumber daya manusia;
- (4) terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah pengangguran hal ini mengakibatkan peningkatan tindak kejahatan yang bermotifkan ekonomi.

c) bidang sumber daya alam

- (1) pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Timur, di mana matapencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap;
- (2) kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Jawa Timur juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan Kabupaten, Mojokerto merupakan kawasan industri utama di Jawa Timur. Gresik dan Tuban dikenal sebagai pusat industri Semen;
- (3) perbatasan Jawa Timur dan Jateng terdapat Blok Cepu terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak;

(4) tanah.....

- (4) tanah pertanian sebagian besar terdiri dari sawah tada hujan dan pengairan setimur tehnis, namun pada saat akan memanen terkena hama sehingga harga beras cenderung naik dan petani tidak bisa menikmati yang diakibatkan naiknya harga pupuk dan ancaman beras impor;
- (5) perhutanan rawan illegal logging mengakibatkan rawan tanah longsor dan banjir;
- (6) adanya penambangan pasir (galian C) secara liar mengakibatkan rawan kasusrusaknya lingkungan;
- (7) pengambilan batu alam yang digunakan sebagai bahan bangunan akan berimbang kerawanan tanah longsor;
- (8) terdapat sumber daya alam lain hutan jati maupun hasil tambang serta budi daya ladang dan sawah, maka jumlah penduduk dan sarana prasarana transportasi kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

d) bidang ideologi

- (1) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain dalam bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui media/medsos).
- (2) terjadinya upaya penyebaran paham/ideologi baru yang lain selain Pancasila
- (3) minimnya sosialisasi Pancasila sebagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat cenderung meningkat radikalisme.

e) bidang politik

- (1) meningkatnya tensi politik pelaksanaan Pemilu pada 2024 banyak paslon yang sudah melakukan kampanye terselubung sehingga semakin meningkatkan suhu politik dengan mulainya parpol yang mempunyai calon mencari dukungan dan simpati masyarakat.
- (2) konflik Politik yang terjadi disejumlah parpol memunculkan kerawanan terjadinya perpecahan di masyarakat dan berpengaruh dalam keadaan sosial politik didaerah.

/(3) kemelut.....

- (3) kemelut ditubuh Parpol akan terjadi penggerahan massa yang cukup dan dapat memicu bentrok antar pendukung masing - masing.
- (4) masih rendahnya profesionalisme aparat pemerintah serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan cenderung menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan.
- (5) adanya perbedaan pendapat dari tokoh masyarakat, elite politik dan cendekiawan dalam menanggapi setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat yang dapat berpengaruh timbulnya instabilitas dan gangguan keamanan.
- (6) masih marak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat seperti LSM, buruh, mahasiswa dengan isu - isu sentral seperti pelanggaran HAM, KKN, penegakan hukum, tenaga kerja yang selalu mendiskreditkan setiap kebijakan pemerintah guna menjatuhkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat secara umum, hal ini diperkirakan akan terus berlanjur seiring dengan kebebasan dalam berdemokrasi.
- (7) program legislasi produk UU rawan terjadinya berbagai kepentingan ekonomi, politik tertentu yang berpotensi menimbulkan kekisruhan politik di internal DPR yang berimbang pada timbulnya polemik maupun gugatan serta mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat melalui unjuk rasa dan penyebaran opini.
- (8) peran elite Politik Parpol pada tahun 2023 akan meningkat serta cenderung pada strategi menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2024.

f) bidang Ekonomi

- (1) dampak krisis ekonomi karena bencana non alam (penyebaran virus Covid-19) yang melanda bangsa Indonesia menambah jumlah penduduk miskin karena banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan kemudian di PHK dan hal ini juga dapat mendorong terjadinya gangguan Kamtibmas.

/2) pemberlakuan.....

- (2) pemberlakuan MEA disamping memiliki dampak berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis di wilayah Regional ASEAN dan nasional.
- (3) munculnya jasa angkutan umum berbasis online yang belum dapat diterima di wilayah Kabupaten Banyumas, Malang, Kediri, Surabaya dan menimbulkan konflik dengan kelompok jasa angkutan konvensional.
- (4) pembangunan proyek infrastruktur (PSN) diwilayah Jawa Timur Pembangkit yang terus mendapat penolakan dari masyarakat terdampak.
- (5) tuntutan dari para pekerja berkaitan dengan UMR/UMK Kabupaten/Propinsi yang masih berpotensi menimbulkan ketidak puasan dikalangan pekerja/buruh
- (6) kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM jenis Premium dan Solar serta kenaikan harga BBM termasuk kenaikan Tarif Dasar Listrik oleh Pemerintah dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan pengaruh naiknya harga barang — barang kebutuhan pokok.
- (7) terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang dibarengi dengan naiknya harga yang cukup tinggi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam produksi pangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- (8) masalah yang dihadapi dalam bidang pertanian yaitu terjadinya kegagalan yang disebabkan karena pengaruh musim (bencana alam banjir jika musim hujan dan kekeringan (musim kemarau).
- (9) serangan hama tanaman serta tidak mampu membeli obat - obatan karena terlalu mahal. Dan sulitnya pupuk bersubsidi, Semakin sempitnya lahan pertanian karena adanya pembangunan perkantoran, perumahan, pertokoan dan perindustrian.
- (10) pembangunan disektor perindustrian merupakan bagian dari pada pembangunan dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang lebih kokoh dan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan eksport, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun permasalahan yang timbul antara lain :
 - (a) permasalahan....

- (a) permasalahan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing;
 - (b) permasalahan yang menyangkut penyalahgunaan ijin tenaga kerja asing;
 - (c) tuntutan persamaan gaji antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia;
 - (d) terjadinya pencemaran lingkungan;
 - (e) kesulitan memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi;
 - (f) permasalahan imbas dari penyebaran Virus Covid-19.
- (11) menghadapi merosotnya harga minyak bumi dipasaran dunia, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan penyesuaian harga BBM, kebijaksanaan pemerintah ini dimaksudkan untuk mengurangi subsidi pemerintah, namun menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya;
- (12) kemajuan dibidang transportasi apabila dikaitkan dengan letak geografis wilayah Jawa Timur yang berbatasan dengan propinsi Jateng akan membawa dampak diantaranya :
- (a) volume lalu lintas akan menjadi sangat padat/semrawut karena merupakan jalur yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Timur dan Jateng;
 - (b) meningkatnya mobilitas manusia dan barang termasuk mobilitaspelaku kejahatan;
 - (c) mulai merebaknya transportasi berbasis online di wilayah Jawa Timur seperti Grab, yang keberadaanya belum diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan 11olemic;
 - (d) daerah Jawa Timur merupakan daerah perlintasan yang dianggap nyaman dari segi fasilitas jalan bagi perjalanan antara Propinsi;
 - (e) dampak dari penyebaran virus Covid -19 yang melanda di seluruh wilayah di Jawa Timur
- (13) wilayah Jawa Timur terdapat banyak obyek wisata yang berskala internasional dan nasional yang selalu dikunjungi wisatawan luar negeri dan dalam negeri seperti cagar alam /dan.....

dan cagar budaya : Candi Majapahit di Mojokerto, Kawasan wisata Gunung Bromo, dan lainnya, Keberadaan objek wisata di satu sisi menunjang pendapatan daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur namun akan memunculkan kerawanan/ ancaman tindak kejahatan pencurian, kejahatan jalanan, pemalsuan uang, pencucian uang, penyalahgunaan Narkoba, serta dampak dari penyebaran virus Covid -19;

- (14) dalam rangka membantu permodalan masyarakat yang bergerak dalam bidang wiraswasta, pemerintah memberikan bantuan kredit melalui bank pemerintah. Karena ketidak mampuan masyarakat dalam bidang management sehingga berakibat kegagalan/kemacetan dalam pengembalian kredit;
- (15) dalam bidang eksport/import pemerintah berusaha meningkatkan eksport (terutama non migas) dan mengurangi/ pembatasan import. Keadaan ini akan mendorong terjadinya penyelundupan barang - barang import ke dalam negeri
- (16) sembako di wilayah Provinsi Jawa Timur cukup tersedia dipasaran, kelangkaan dan kenaikan Sembako biasanya pada saat Idul Fitri dan Natal. upaya Satgas pangan dalam menekan harga Sembako dilapangan dirasa sangat berpengaruh.
- (17) permasalahan yang dihadapi dalam bidang perdagangan yang menjadi faktor korelatif kriminogen antara lain adanya dominasi kegiatan perdagangan oleh WNI Keturunan China dan adanya persaingan harga dan persaingan mutu barang - barang daganganyang kurang sehat.

g) bidang sosial budaya

- (1) permasalahan kenaikan UMK di Kab/Kota provinsi Jawa Timur akan selalu diangkat oleh kelompok buruh. Penetapan UMK per tahun yang tidak sesuai bagi perwakilan buruh merupakan isu yang selalu di gaungkan untuk menuntut pemerintah daerah/pengusaha;
- (2) Intoleransi kelompok/ormas tertentu terhadap pemeluk/ormas agama lainnya dalam menjalankan kegiatan agama masih

- akan terus terjadi terkait adanya kecenderungan penggunaan kekuatan massa ormas dalam melakukan persekusi atau intoleran;
- (3) meningkatnya premanisme di wilayah Jawa Timur dimana banyak kelompok kelompok preman bergabung dalam ormas yang bertujuan pengumpulan dana ormas dan menekan para pengusaha;
- (4) meningkatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahun yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran hal ini merupakan kerawanan yang dapat mengarah kriminalitas;
- (5) masih adanya fanatisme agama yang sempit dikalangan masyarakat tertentu, sehingga kondisi semacam ini akan sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh golongan ekstrim atau golongan tertentu untuk mencapai tujuan politiknya dan merupakan sumber potensial terhadap pengaruh serta penggalangan pihak lawan;
- (6) bentrok antar ormas yang di pengaruhi egosentris kelompok maupun konflik kepemimpinan ormas;
- (7) masalah terkait kependidikan, dana kependidikan dari pemerintah pusat dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum sehingga rentan terhadap pengaruh dan hasutan dari kelompok tertentu.;
- (8) aksi unjuk rasa yang menunjukkan adanya peningkatan, pada umumnya berkisar tentang: penyakit masyarakat, masalah tenaga kerja, masalah tanah, kebijakan pemerintah daerah;
- (9) masalah-masalah Sosial Budaya yang dapat menimbulkan kerawanan dan perlu mendapat perhatian antara lain:
- (a) kelompok buruh (Gerbang, FSPMI) yang mulai berafiliasi kepada gerakan politik;
 - (b) masalah penolakan kegiatan pengajian MTA;
 - (c) mantan pengikut dan pengurus eks HTI yang tersebar di wilayah Jawa Timur;
 - (d) keberadaan laskar-laskar Islam di wilayah Jawa Timur sering bersinggungan dengan Polri dan masyarakat;

/(e) keberadaan.....

(e) keberadaan pengikut eks FPI di berbagai wilayah provinsi Jawa Timur yang aktif dalam pergerakan PA 212;

(f) bentrok antar ormas Pemuda Pancasila dan Lindu Aji;

(g) bentrok PSHT Pa 16 dan 17.

h) bidang Keamanan

(1) dibidang keamanan dan hukum secara umum ganguan kamtibmas yang terjadi terbagi dalam beberapa kategori diantaranya kejahatan konvensional (Currat, Curras dengan senpi dan sajam,Curranmor, Anirat), kejahatan trans nasional (Aksi teroris Narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (Illegal Logging maupunKorupsi), kejahatan berimplikasi kontijensi (Sara);

(2) gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat yang paling menonjol dan diperkirakan akan terus berkembang serta menjadi ancaman di tahun 2024 antara lain : kejahatan Cyber, penipuan dan penggelapan, Curranmor, Currat, Curras, Anirat, pembakaran/kebakaran, pengrusakan, pembunuhan, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, KDRT, kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dan teror melalui penyebaran berita hoax serta ujaran kebencian;

(3) gangguan kamtibmas yang terjadi secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi baik secara konvensional maupun non konvensional;

(4) kesadaran, ketaatan, menjujung dan menegakkan supremasi hukum, belum menunjukkan peningkatan yang pesat dan merata baik di kalangan aparatur pemerintah, masyarakat maupun penegakhukum;

(5) terdapat kecenderungan tindakan main hakim sendiri, persekusi oleh kelompok masyarakat, antar kelompok yang berkembang seperti bentrok PSHT di Padepokan PSHT jalan Merak Madiun Kota, dan PSHT dari parluh 16 kab Magetan, maupun bentrok antar perguruan silat di beberapa kab kota yang dilakukan oleh oknum warga silat PSHT, Pagar Nusa IK Kera Sakti;

/(6) adanya.....

- (6) adanya kecenderungan rendahya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemaksaan kehendak yang didasari sifat emosional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kelompok masyarakat yang melakukan pengrusakan, pembakaran, penjarahan dan mulai berani melawan petugas;
- (7) mengawasi Orang Asing yang berada di wilayah Jawa Timur dengan berbagai kepentingan tersebut tidak mempunyai kesempatan melakukan kejahatan atau pelanggaran, menanggulangi apabila kejahatan terjadi;
- (8) mencegah dan menanggulangi masuknya Orang Asing ke wilayah RI tanpa sejijn pemerintah RI / ilegal;
- (9) kasus- kasus kejahatan atau pelanggaran yang menyangkut orang Asing antara lain kejadian/pelanggaran dengan orang Asing sebagai korban dan perlu diwaspadai adalah terjadinya lahgum dokumen Orang Asing yang tidak sesuai peruntukan.

i) bidang SARA

masalah SARA merupakan suatu permasalahan yang sangat peka dan dapat menimbulkan ancaman terhadap terjadinya gangguan kamtibmas, kerawanan - kerawanan yang dapat berkembang menjadi kasus SARA yaitu :

- (1) aksi teror yang terjadi di berbagai daerah akhir - akhir ini dapat menimbulkan ancaman terhadap perpecahan kerukunan antar pemeluk agama;
- (2) adanya sikap anti China dan perasaan kurang senang terhadap salah satu agama yang masih ada disebagian masyarakat disebabkan pemahaman / fanatismenya agama yang sempit serta kurangnya sikap toleransi antar umat agama;
- (3) terdapat perbedaan sosial ekonomi yang menyolok antar WNI keturunan China dengan golongan pribumi;
- (4) adanya sikap ekslusif dari golongan WNI keturunan.

j) bidang internal security

- (1) terlibatnya oknum anggota Polri baik langsung maupun tidak langsung dalam kasus - kasus kejahatan;
- (2) penyalahgunaan wewenang yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

/3) pelanggaran.....

- (3) pelanggaran - pelanggaran yang dibuat oleh oknum anggota Polri diantaranya berupa perbuatan mabuk-mabukan, berada ditempat hiburan malam, perjudian dan bermain perempuan;
- (4) kurangnya penguasaan dan ketrampilan anggota dibidang fungsi teknis Kepolisian;
- (5) terdapat oknum yang tidak memiliki tanggung jawab moral dan lebih merasa sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat;
- (6) bahwa kemandirian Polri saat ini belum mencerminkan adanya sikap yang positif dari beberapa unsur/element khususnya dalam peningkatan kesejahteraan bagi personil Polri dan penyaluran anggaran bagi kepentingan dinas;
- (7) masih banyaknya anggota yang kurang disiplin, kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang diemban tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada atasan tetapi kontrak dengan Tuhan sehingga akan mempengaruhi semangat dalam pelaksanaan tugas;
- (8) masih banyak ditemukan anggota Polri yang kurang bijak dalam memanfaatkan sosial media dengan mengupload gambar dan video yang tidak pantas sehingga dapat menurunkan citra Kepolisian.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polda Jatim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polda Jatim yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari pusat sampai dengan perbatasan dan pulau terluar berpenghuni dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jatim dalam melaksanakan tugasnya, Polda Jatim telah melaksanakan berbagai upaya pembentahan melalui langkah-langkah yang terencana dan terukur dengan pembangunan jumlah proporsional SDM, Personel Polri Polda Jatim saat ini sebanyak 38.065 orang yang terdiri dari 2 Pati, 818 Pamern, 3.858 Pama, 33.355 Brigadir/Tamtama serta PNS Polda Jatim sebanyak 2.839 orang terdiri dari 64 orang Gol IV, 639 orang Gol III, 2.136 orang Gol II dan Gol I,

/sebagai.....

sebagai komplemen utama dalam organisasi Polda Jatim. Sementara itu rasio polisi terhadap penduduk (*police ratio*) sebesar 1 : 1.075 yang menunjukkan perbandingan yang belum ideal.

Postur kekuatan Polda Jatim telah terstruktur dan tergelar di Mapolda Jatim dan satuan kewilayahan yang terdiri dari 1 Polrestabes, 3 Polresta, 35 Polres, 653 Polsek dengan Tipologi 99 Polsek B, 543 Polsek C, 11 Polsek tipe D dan 9 Polsubsektor sesuai dengan pola kebutuhan dan keseimbangan organisasi dengan kompetensi utama profesional, bermoral, modern, unggul dan humanis guna memantapkan pelaksanaan pelayanan publik yang unggul (*excellent*) agar situasi kamtibmas di wilayah Jawa Timur semakin aman dan kondusif.

Berdasarkan Laporan hasil penilaian atas kinerja maupun pertanggung-jawaban, Polda Jatim memperoleh kriteria sebagai berikut, hasil evaluasi SAKIP Polda Jawa Timur Tahun 2021 oleh Itwasum Polri mendapat nilai 73,27 dengan kategori BB (baik, perlu sedikit perbaikan), hal ini berdampak pada akan diusulkan kembali kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi diatas 80%.

Meningkatnya potensi konflik sosial yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme melalui sarana media social, berpotensi gangguan keamanan masih sangat luas dari konflik-konflik yang timbul akibat dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, *euforia*, kebebasan menyampaikan pendapat dan konflik kepentingan partai politik. Peningkatan dinamika masyarakat yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, telah membawa perubahan pola pikir kehidupan masyarakat, salah satu akses mudahnya pemunculan prilaku ekstrim dan pemikiran masyarakat yang negatif, diimplementasikan melalui perbuatan-perbuatan yang ekstrim dalam bentuk pelecehan seksual, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, peledakan bom, tindakan *anarkhis*, bisnis *illegal*, premanisme yang menciptakan ketidaktertiban, dan konflik yang berdampak kepada terjadinya gangguan kamtibmas. Opini yang dibangun di media sosial untuk melemahkan pemerintah melalui issu politik, sosial, tenaga kerja asing dan penegakkan hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang melahirkan aksi unjuk rasa yang berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik dari suatu golongan. Hakekat ancaman yang rutin terjadi

sesuai dengan kalender Kamtibmas Tahunan antara lain perayaan Tahun baru, keagamaan dan agenda Pemerintah daerah yakni kegiatan pesta kesenian serta peringatan hari besar internasional dan nasional.

Polda Jatim telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana narkoba dan judi yang ada di wilayah kerja Polda Jawa Timur dengan menunjukkan kenaikan yang signifikan, hal tersebut merupakan pencapaian yang positif dalam kinerja Polda Jatim sekaligus menjadi peringatan kepada para bandar. Pada Tahun 2022 Polda Jatim telah menangani 652 kasus dengan 235 pengungkapan kasus judi *online*. Angka tersebut naik dari total 609 kasus di sepanjang 2021. Sedangkan untuk kuantitas kasus pengungkapan tindak pidana narkoba, Polda Jatim menempati peringkat pertama dengan 3.394 kasus pada paruh waktu pertama tahun 2022.

FBI (Federal Bureau of Investigation) memberikan penghargaan (Letters of Appreciation) kepada Ditreskrimsus Polda Jatim atas pengungkapan kasus pembuatan dan penyebaran Scampage/website palsu yang menyerupai website resmi pemerintahan negara Amerika Serikat.

Legal attaché FBI untuk Indonesia dan Timor Leste sangat mengapresiasi bantuan Polda Jatim dalam pengungkapan kasus dan berharap kerjasama antara FBI dan Polda Jatim dapat terus berlanjut di masa yang akan datang, sehingga dapat menunjukkan kolaborasi dalam memerangi kejahatan dan tekad bersama untuk melihat keadilan ditegakkan. untuk memerangi kejahatan transnasional dan dunia maya di semua tingkatan.

Menteri Pertanian (Mentan) mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang berhasil mengungkap penyalahgunaan pupuk subsidi yang merupakan pupuk yang dialokasikan secara khusus kepada petani yang betul-betul membutuhkan. Sebagaimana diketahui, mengapresiasi Polda Jatim berhasil mengungkap penyalahgunaan pupuk bersubsidi sebanyak 279,45 ton yang mengganggu stabilitas keamanan pangan nasional yang merupakan konsentrasi pemerintah saat ini.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi dalam konteks lingkungan strategis domestik terdapat perkembangan kondisi terbaru dan memiliki kekhususan antara lain perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan /peluang.....

peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber), gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*.

Pandemi Covid-19 sudah hampir dua tahun melanda dunia, sejak kasus pertama Covid 19 secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang terjangkit positif Covid- 19 meski dalam jumlah yang relatif sudah tidak tinggi lagi. Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Selain dampak utama di bidang kesehatan, juga berimbas pada program pendidikan dengan dihentikannya aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah dan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut menjadi faktor psikologis seseorang yang memiliki rasa kekhawatiran dan mengalami kejemuhan terhadap pandemi covid 19, kekhawatiran ini memang beralasan dan juga jika terdampak covid 19. Masyarakat perlu didorong untuk memahami teknologi informasi dan mengerti konsekuensi dari era digital saat ini agar dapat mengakses layanan publik secara daring terutama selama masa new normal. Edukasi protokol kesehatan COVID-19 pun masih harus perlu digalakkan di berbagai media sebagai sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi new normal yaitu pelayanan publik yang prima, terutama pelayanan kesehatan yang menjadi tuntutan.

Layanan publik merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang tidak terpisahkan. Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah memberlakukan kebijakan publik seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM Mikro dan sampai PPKM Makro yang diterapkan saat ini untuk menghambat laju perkembangan Covid-19. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi tingginya tingkat mobilitas penduduk.

Kini, tahapan penanganan COVID-19 telah memasuki babak baru yang disebut new normal. Dalam pelaksanaan kebijakan publik di tengah pandemi COVID-19 ini pun bukan tanpa kendala, sudah banyak hal yang dilakukan antara Polda Jatim dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, elemen lembaga lainnya, dan juga tidak lupa peran serta dari keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat saat pandemi COVID-19. Selain itu juga

/berbagai.....

berbagi peran dalam mengatasi segala persoalan yang bersinggungan dengan COVID-19.

Polda Jatim telah membentuk Tim Satgas Pangan Polda Jatim, dalam beberapa hari ini intensif melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait dalam mengantisipasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi di Jawa Timur.

Tim Satgas Pangan Polda Jatim secara proaktif sudah mengambil langkah-langkah, antara lain berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), berkoordinasi dengan Bea dan Cukai, berkoordinasi dengan Balai Karantina serta berkoordinasi dengan Pusat Veterinan Farma untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK pada hewan ternak. Hingga saat ini, diduga baru 4 kabupaten yang ada di Jawa Timur telah terpapar, antara lain Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Lamongan. Polda Jatim telah membuat arahan dalam bentuk telegram kepada para Kapolres Jajaran untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna melakukan langkah-langkah antara lain :

1. memastikan ketersediaan obat-obatan dalam rangka melanjutkan pengobatan simptomatis pada hewan ternak yg terkena wabah PMK.
2. melakukan pembatasan lalu lintas pada hewan ternak dari dan menuju daerah wabah
3. melakukan vaksinasi pada hewan ternak yang sehat

Selanjutnya satgas Pangan Polda Jatim akan terus berkoordinasi dengan Pemprov jatim bersama stake holder terkait dalam penanganan lebih lanjut.

1. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polda Jatim seiring dengan perkembangan lingkungan strategi regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polda Jatim dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polda Jatim yang semakin tinggi mengharuskan Polda Jatim menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan keamanan Jawa Timur. Secara umum dengan mencermati berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kondisi umum dan hasil analisis maka teridentifikasi beberapa permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Jatim pada Tahun 2023, sebagai berikut :

- a. penyebaran wabah *Covid-19* dengan varian-varian baru masih akan terus mengancam yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respon terhadap pandemi untuk mengantisipasi resiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (*physical distancing*), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
- c. isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2023;
- d. konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA, terlebih lagi dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2024;
- e. transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan. Pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan siber seperti *spamming*, *phising* dan *hacking*;
- f. perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi *Hoax* yang melanggar UU IT;
- g. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi ditahun 2023, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan menganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- h. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan;
- i. keberadaan dan kegiatan kelompok teroris di Indonesia masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah;
- j. gangguan Kamtibcar Lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta

/rendahnya.....

rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;

- k. kurangnya pengawasan dan tanggungjawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan udara, laut dan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil;
- l. rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang, serta masih tingginya konflik sosial, aksi sweeping, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat perlu penanganan secara komprehensif;
- m. percepatan teknologi digital yang sangat cepat sehingga Polda Jatim dituntut untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- n. semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
- o. masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas sehingga gangguan Kamtibcarlantas berupa: kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- p. kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus ditingkatkan penanganannya secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus;
- q. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- r. adanya pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan maka masih perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polda Jatim;
- s. pengamanan tahapan pemilu menuju 2024.

2. Daerah Kabupaten Malang

a) Geografis

Daerah Kab Malang berada pada ketinggian 400 m sampai dengan 900 m dari permukaan laut, dengan batas daerah sebelah /utara.....

utara dengan pegunungan Arjuno dan jalan raya Pasuruan Surabaya, disebelah timur dengan hutan lindung pegunungan Semeru dan Bromo. Di sebelah selatan dengan laut selatan (Sumatera Hindia) dan batas di sebelah barat dengan bendungan Selorejo, Hutan lindung Kalipare dan Donomulyo serta pegunungan Kawi. Luas Daerah Hukum Polres Malang 3.499,02 km² atau 349,902.00 Ha. terdiri dari 30 Polsek dan 30 Kecamatan (12 Kelurahan, 349 Desa, 2.935 RW dan 14.257 RT).

b) Demografi

Jumlah penduduk di Daerah Hukum Polres Malang adalah 2.493.647 jiwa, dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1.255.353 jiwa laki-laki dan 1.238.294. jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk rata-rata 713 orang/km², dan kepadatan dipegunungan 291 orang/km².

c) Sumber Daya Alam

Kabupaten Malang sebagai Daerah hukum Polres Malang mempunyai sumber daya alam seperti air (PDAM, Bendungan, Tambak ikan, Irigasi, dan PLTA) kandungan Bumi (Tambang galian gol c), Batu Kapur, Pasir dan Batu kali. Adapun potensi sumber energy berupa Air yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, gas, dan uapmasih belum di manfaatkan untuk sumber energy dan angin belum dimanfaatkan. Potensi Pariwisata diwilayah Polres Malang terdiri dari pariwisata alam (pegunungan, Danau, Wisata air, Lembah/Gua dan Pantai), Pariwisata Budaya (Benda Purbakala, Keraton, Tradisi, dan lain-lain).

d) Aspek Ideologi

- (1). Ancaman bahaya laten komunis dan perkembangannya komunis gaya baru sehingga mengancam ideologi Pancasila dan meresahkan masyarakat.
- (2). Ancaman dan rongrongan terhadap ideologi Pancasila adalah upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu /yang.....

yang secara sistematis menginginkan untuk mengubah ideologi Pancasila, ancaman terhadap ideology Pancasila berasal dari kelompok EKA yang secara terang-terangan menolak ideologi Pancasila dan menganggap pemerintah saat ini adalah "thoghut" dan harus digantikan dengan mendirikan Negara Islam.

Adapun orang / kelompok radikal di wilayah hukum Polres Malang :

- (a) JAS (jama'ah Ansharus Syariah) Malang Raya yang diketuai / Amir Jas Malang Raya: ust. SLAMET KAREN (Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang) dan tidak memiliki kantor Sekretariat sedangkan aktivitas pertemuan Pengurus dan anggota dilakukan di Masjid Muhajirin Jl. Ir. H. Juanda Gg IX A / 2 Jodipan Blimbing Kota Malang (Dekat tempat tinggal Ust M. ACHWAN) dan masjid Umar Bin Khatab kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang (Takmir An. USMAN SAHADI)
- (b) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang di ketuai Ust RAKHMAD FAJAR WIJAYA

e) Aspek Politik

- 1) perkembangan politik di daerah hukum Polres Malang tidak lepas dari perkembangan Politik secara nasional yang dipengaruhi oleh perkembangan politik global yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
- 2) ditetapkannya UU no 32 tahun 2004 tentang Pemda dan UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diharapkan dapat mempercepat sektor pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, disentralisasi dan otoda belum sepenuhnya didukung aturan pelaksanaan, sehingga timbul benturan kepentingan.
- 3) disahkannya Undang-undang pemerintahan desa oleh DPR RI merupakan indikasi kemenangan kelompok penekan,

/Khususnya.....

khususnya parade nusantara yang merupakan metamorphosis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan akan terjadi kecenderungan jabatan kepala desa akan menjadi ajang berebut jabatan karena ada alokasi anggaran sebesar 1Milyar/ tahun.

f) Aspek Ekonomi

- 1) Situasi perekonomian di daerah hukum Polres Malang relative aman dapat dilihat dari korelasi permintaan dan penawaran di seluruh pasar daerah Polres Malang masih dinamis, tidak terjadi kerawanan pangan di Kab. Malang, dan stok sembako aman, tidak terjadi kelangkaan komoditi tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- 2) Adapun permasalahan perekonomian yang menonjol sering kali terjadi pada saat peringatan hari besar keagamaan, hal ini dipicu oleh peningkatan kebutuhan hidup masyarakat akibat pola konsumerisme yang berlebihan pada saat menyambut hari raya keagamaan. Dengan meningkatnya permintaan menyebabkan beberapa oknum pedagang berupaya mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual barang-barang yang tidak layak jual yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu ada tindakan yang merugikan dan meresahkan masyarakat dengan melakukan penimbunan sembako dan BBM bersubsidi yang kemungkinan dilakukan oleh spekulasi.
- 3) Permasalahan perekonomian yang merupakan dampak kebijakan pemerintah yang dapat berimbas pada gangguan kamtibmas karena respon negative oleh masyarakat dalam bentuk aksi unjuk rasa.
- 4) Masih terjadinya peredaran uang palsu, illegal logging, illegal mining, illegal fishing dan money loundring.
- 5) Dampak perubahan iklim, bencana alam banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung yang melanda

beberapa desa mengakibatkan kerusakan, korban jiwa dan harta benda.

g) Aspek Sosial Budaya

- (1) Dinamika kehidupan sosial budaya di daerah Kabupaten Malang yang dapat berpotensi menimbulkan kerawanan selama periode tahun 2024 hal ini adanya keragaman keyakinan yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Malang.
- (2) Permasalahan sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik horizontal antara lain:
- (3) Permasalahan pendirian/penggunaan tempat ibadah oleh kelompok minoritas.
- (4) Permasalahan aliran / ajaran yang dianggap sesat.
- (5) Permasalahan tindak asusila yang terjadi dalam institusi pendidikan agama (pencabulan/ pemerkosaan) yang direspon tegas oleh masyarakat.
- (6) Permasalahan pendirian Tower provider seluler akibat perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro kontra pada masyarakat sekitar bangunan tower akibat tuntutan kompensasi.
- (7) Permasalahan dibidang ketenagakerjaan antara lain PHK, UMK, tenaga Outsourcing, permasalahan tuntutan hak-hak normative yang belum terpenuhi oleh perusahaan serta permasalahan aksi solidaritas buruh khususnya terkait pelaksanaan aksi buruh dalam memperinganti hari buruh International.
- (8) Permasalahan dibidang Pemerintahan yang menjadi sorotan publik adalah pelayanan publik yang dianggap buruk dan bermuatan KKN serta tuntutan masyarakat terkait kinerja pemerintah yang dianggap belum terealisasi sebagaimana janji dalam pemilu.
- (9) Permasalahan dibidang agraria/ pertanahan masih banyak terjadi di daerah hukum Polres Malang baik antara warga dengan instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta.

/(10) permasalahan.....

- (10) Permasalahan terkait dengan penolakan warga terhadap berdirinya swalayan (Indomaret dan Alfamart).
- (11) Permasalahan suporter sepak bola Aremania seringkali dapat menimbulkan gangguan kamtibmas akibat tarik ulur kepentingan oleh pihak-pihak tertentu, selain itu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengerahan massa seperti konvoi dapat mengganggu kamtibselcarlantas, terlebih pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan.
- (12) Permasalahan kesehatan dan wabah penyakit, akan mendapatkan perhatian publik apabila jatuh korban secara massiv, maupun timbulnya epidemik penyakit tertentu yang dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pihak Dinkes.

h) Aspek Keamanan

- (1) Ketimpangan sosial yang ditandai semakin meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta keterbatasan lapangan pekerjaan;
- (2) Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang memunculkan anggapan tidak pro rakyat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas;
- (3) Penanganan represif kepolisian memunculkan issue pelanggaran HAM oleh TNI/POLRI, pengaduan masyarakat ke Presiden, DPR RI, Komnas Ham dan Kompolnas, serta gugatan praperadilan;
- (4) Adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap setiap gejala dan perkembangan situasi dilingkungannya;
- (5) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa;
- (6) Tingkat kesadaran tentang keamanan lingkungan diserahkan kepada satpam/penjaga bukan dari BUJP melainkan direkrut dari warga masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan pelatihan;
- (7) Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera (Effect Dettrence);

/(8) adanya.....

- (8) Adanya celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku dan petugas;
- (9) Adanya oknum petugas penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang;
- (10) Lemahnya pengawasan peredaran senpi non-organik dan beredarnya toys-gun/replika senpi memicu semakin meningkatnya kejahatan curat/curas;
- (11) Adanya kecenderungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan perilaku kejahatan menjadi semacam “ Sekolah ” untuk meningkatkan kemampuan MO maupun terbentuknya kelompok baru karena adanya sosialisasi diantara para Napi;
- (12) Ancaman Terorisme berskala besar di Indonesia relatif berkurang, namun potensi ancamannya tidak punah / hilang, karena selama cita – cita Ideologinya belum tercapai dan adanya kesenjangan pada aspek politik dan ekonomi maka kelompok teroris terus melakukan aksinya dengan berbagai cara dan melakukan rekrutmen anggota melalui kegiatan pengajian dengan memanfaatkan kondisi sosial masyarakat;
- (13) Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan kelembagaan dalam memerangi terrorisme di ASEAN, kerjasama di bidang Intelijen khususnya dalam rangka kerja sama dibidang politik dan keamanan regional ASEAN (Politc and Security Community) sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi jaringan dan pola rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok Terrorisme dengan piawi memanfaatkan arus globalisasi untuk kepentingan kelompoknya, namun demikian setiap intelijen negara asing pasti juga melakukan kegiatan intelijen untuk negaranya dengan cover memberikan bantuan baik teknis, pelatihan ataupun pendanaan, sehingga aktifitas intelijen asing tersebut harus selalu diwaspadai dengan melakukan gerakan kontra intelijen.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polres Malang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polres Malang yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari pusat sampai dengan perbatasan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Malang. Personel Polri Polres Malang saat ini sebanyak 1.108 orang, yang terdiri dari 14 Pamen, 121 Pama, 973 Brigadir serta PNS Polres Malang sebanyak 93 orang terdiri dari 12 orang Gol III, 73 orang Gol II, 8 orang Gol I, sebagai komplementer utama dalam organisasi Polres Malang, dengan *police ratio* 1 : 2.281.

Postur kekuatan Polres Malang teljopah terstruktur dan tergelar di Polres Malang dan satuan kewilayahan yang terdiri dari 30 Polsek dengan Tipologi 7 Polsek B dan 23 Polsek C sesuai dengan pola kebutuhan dan keseimbangan organisasi dengan kompetensi utama profesional, bermoral, modern, unggul dan humanis guna memantapkan pelaksanaan pelayanan publik yang unggul (*excellent*) agar situasi kamtibmas di Kabupaten Malang semakin aman dan kondusif.

Sarana/peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Polres Malang dan jajaran, Sat Sabhara memiliki 10 unit Ranmor Patroli Roda 4, 24 unit Ranmor patroli Roda 2, Sat Lantas diperkuat dengan 21 unit Ranmor roda 4 berbagai jenis, 1 Bus SIM Keliling dan 45 unit Ranmor Roda 2 berbagai merk, sedangkan untuk mobilitas Dalmas maupun sarana angkut personel tersedia 3 unit Truck dan 1 Unit Bus. Setiap Polsek memiliki 3 unit kendaraan patroli roda 4 (kijang pick up, Mitsubishi kuda, Strada, Daihatsu Grandmax dan Sedan), sedangkan Ranmor Roda 2 setiap Polsek memiliki 8 hingga 23 Unit kendaraan, Sat Reskrim memiliki 2 Unit kendaraan Roda 4 Double Cabin dan Ransus IDENTIFIKASI, Sat Intelkam memiliki 2 Unit kendaraan Roda 4 Ransus Intelijen dan Yanmas Daihatsu Grandmax, sehingga sangat memudahkan dan mempercepat dalam kegiatan operasional Kepolisian.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber).

/masih.....

Masih dijumpai permasalahan hukum di mata masyarakat terkait integritas hukum masih belum tercapai rasa berkeadilan, transparan, akuntabel berkeadilan, diskriminasi dan cenderung komersialisasi dari tingkat penyidikan sampai peradilan (Polri, Jaksa/ PU dan Hakim) dalam sistem CJS, sehingga berpotensi praktik mafia hukum, serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah, cenderung anarkis/main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan 4 jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan Narkoba menuntut Polres Malang untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

Meningkatnya potensi konflik sosial yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme melalui sarana media social, berpotensi gangguan keamanan masih sangat luas dari konflik-konflik yang timbul akibat dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, *euforia*, kebebasan menyampaikan pendapat dan konflik kepentingan partai politik. Peningkatan dinamika masyarakat yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, telah membawa perubahan pola pikir kehidupan masyarakat, salah satu akses mudahnya pemunculan prilaku ekstrim dan pemikiran masyarakat yang negatif, diimplementasikan melalui perbuatan-perbuatan yang ekstrim dalam bentuk pelecehan seksual, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, peledakan bom, tindakan *anarkhis*, bisnis *illegal*, premanisme yang menciptakan ketidaktertiban, dan konflik yang berdampak kepada terjadinya gangguan kamtibmas. Opini yang dibangun di media sosial untuk melemahkan pemerintah melalui issu politik, sosial, tenaga kerja asing dan penegakkan hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang melahirkan aksi unjuk rasa yang berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik dari suatu golongan. Hakekat ancaman yang rutin terjadi sesuai dengan kalender Kamtibmas Tahunan antara lain perayaan Tahun baru, keagamaan dan agenda Pemerintah Daerah yakni kegiatan pesta kesenian, peringatan hari besar internasional dan nasional serta agenda pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dilaksanakannya transparansi pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK yang disertai dengan terobosan pelayanan melalui pelayanan *three in one* (pelayanan Pembayaran Pajak, pengurusan perpanjangan sim dan penerbitan SKCK), Samsat keliling, BPKB, SKCK Online, SPKT on-line dan CJS on-line di Polres serta transparansi rekrutmen anggota Polri telah menambah kepercayaan masyarakat / instansi samping terhadap kinerja Polres Malang.

Berjalannya program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di jajaran Polres Malang untuk mewujudkan kinerja Kesatuan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat guna mempertahankan predikat Pelayanan Prima Kepolisian yang telah diraih oleh Polres Malang.

c. Identifikasi Masalah.

Pelaksanaan tugas Polres Malang seiring dengan perkembangan lingkungan strategi regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polres Malang dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polres Malang yang semakin tinggi mengharuskan Polres Malang menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan keamanan Kabupaten Malang. Secara umum dengan mencermati berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kondisi umum dan hasil analisis maka teridentifikasi beberapa permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polres Malang pada Tahun 2024, sebagai sebagai berikut:

- a. dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran Covid-19 yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa yang masih akan terjadi di tahun 2024 akan mengganggu stabilitas dan keamanan di Kabupaten Malang;
- c. proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;
- d. peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, kejahatan siber serta kejahatan konvensional semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat;

- e. masih tingginya konflik sosial, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- f. percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polres Malang untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber dalam memberikan ketanggap segeraan atas respon pelayanan masyarakat (*quick respon*);
- g. semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
- h. masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas;
- i. kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang masih belum dapat tertangani secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus;
- j. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- k. jumlah kekuatan personil Polri di Polres Malang, belum dapat mencukupi secara keseluruhan sampai dengan tingkat Polsek;
- l. satu Desa satu Bhabinkamtibmas, sebagai basis deteksi dini dan *problem solving* tugas, belum mencapai ideal karena masih merangkap tugas di beberapa desa, dan terlibat tugas operasional;
- m. penugasan personal sebagai Polisi RW yang membantu tugas Bhabinkamtibmas juga masih belum terpenuhi dimasing-masing RW pada Desa tersebut;
- n. penguatan pengawasan internal dan kerjasama dengan pengawasan eksternal yang masih perlu ditingkatkan untuk menjawab opini dan kepercayaan publik;
- o. terbatasnya dukungan anggaran pada program Lidik Sidik, mengakibatkan kurang maksimal dalam pengungkapan kasus;
- p. belum optimalnya pemenuhan kebutuhan Almatsus/Alpakam sesuai kondisi geografis Polres Malang dan tantangan pelaksanaan tugas anggota dilapangan;
- q. belum tersedianya rumah tahanan Polri (Rutan Polri), yang sesuai standard HAM serta rumah barang bukti dan sitaan negara (Rumbasan) yang layak;
- r. tahapan hingga pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 juga perlu diperhatikan sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas kamtibmas di Kabupaten Malang;
- s. pasca peristiwa tragedi kanjuruhan dimungkinkan akan sering terjadi unjuk rasa dari Aremania maupun dari simpatisan korban tragedi kanjuruhan.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Jatim

1) Visi

/"Terwujudnya.....

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polda Jawa Timur”.

Makna Visi Polda Jatim :

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur.

2) Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jawa Timur.”

Makna Misi Polda Jatim :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Visi dan Misi Polres Malang

1) Visi

“ Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polres Malang”.

Makna Visi Polres Malang:

Kabupaten Malang menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Malang.

2) Misi

“ Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polres Malang .”

/Makna.....

Makna Misi Polres Malang :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Tujuan Jangka Menengah Polda Jatim

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur
- 2) menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur;
- 3) mewujudkan SDM Polda Jawa Timur yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jawa Timur;
- 5) menerapkan manajemen Polda Jawa Timur yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan Jangka Menengah Polres Malang

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Malang.
 - Menurunnya kriminalitas (curat, curas, curanmor, kejahatan jalanan)
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan
 - Menurunnya complain masyarakat terhadap penegakkan hukum yang dilakukan Polri dan meningkatnya kepercayaan masyarakat
- 3) Mewujudkan Polres Malang yang profesional
 - Menurunnya pelanggaran anggota (disiplin, kode etik dan pidana umum)

- 4) Modernisasi pelayanan Polres malang
 - Meningkatnya pelayanan publik dan bebas percaloan
- 5) Menerapkan manajemen Polres Malang yang terintegrasi dan terpercaya
 - Menurunnya prilaku koruptif, arogan kewenangan dan kekerasan eksesif

3. Sasaran Prioritas Tahun 2024

- a. Sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat di wilayah Jawa Timur;
 - 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim;
 - 3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
 - 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jatim;
 - 5) Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
 - 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik.

b. Sasaran Prioritas Polres Malang

sasaran prioritas Polres Malang Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat di wilayah Kabupaten Malang;
- 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polres Malang;
- 3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;

/4) meningkatkan.....

- 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Malang;
- 5) Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik.

III. Arah Kebijakan Polda Jatim 2024 dan Polres Malang

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim Tahun 2024

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat wilayah Jawa Timur**”, yaitu:
 - 1) penguatan peran Polda Jatim dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini) fungsi intelejen keamanan Polri yang di dukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS1/IKU1/ PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
 - b) melakukan Lidik pamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS1/IKU1/ PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
 - c) mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial yang menjadi ancaman di wilayah Jatim meliputi konflik Sunni-Syiah, kelompok intoleran, suporter bola, Perguruan Silat dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

/(giat....

- (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64,65, 130, 131);
- d) melaksanakan survei terhadap persentase penduduk yang merasa aman dalam rangka mendukung Indeks Kamtibmas di lingkungan Polda Jatim.
(giat 5067/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 4, giat 11, renaksi 41, 42, 43);
- e) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial menjelang Pemilu 2024 di tahun 2022 dan gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- f) mengantisipasi konflik yang berawal dari medsos terkait intoleransi menjelang Pemilu TA 2024;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130)
- g) mengidentifikasi wilayah dan kelompok criminal bersenjata/ gunakan bom rakitan yang berpotensi laksanakan aksi dan laksanakan pemantauan dengan strategi kring Reskrim sehingga dapat dilaksanakan penindakan sebelum terjadi;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- h) peningkatan peran serta petugas Polmas dalam kegiatan basis deteksi dan basis solusi potensi kerawanan;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65);
- i) peningkatan mutu perawatan personel/tunjangan fungsional bagi pelaksna petugas bhabinkamtibmas dan petugas Polmas di lapangan.
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65);
- 2) meningkatkan pencegahan proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

/untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemantapan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
- b) pemberdayaan Kampung Tangguh Semeru (KTS) yang ada di jajaran Polda Jatim, selain penanganan covid-19, juga sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, terorisme, kejahatan Konvensional lainnya, dll);
(giat 5076 /prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 15, 16, renaksi 46, 47, 56, 57, 59, 65);
- d) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 63);
- e) meningkatkan perilaku peran civil society dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
- f) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
(giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);

/g) melaksanakan.....

- g) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat 3155/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 13, 16 renaksi 46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66);
- h) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan;
(giat 5081/ prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- i) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas dan pengamanan di tempat obvit/ obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat 3130, 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 50).
- j) melaksanakan asistensi dan sosialisasi tentang sistem manajemen pengamanan obvitnas/ obyek vital tertentu untuk pencegahan dini dalam mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas;
(giat 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50);
- k) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan internal (lembar penerangan satuan) dan eksternak (himbauan publik berupa pamphlet, spanduk, billboard);
(giat 3149, 3070/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 13, giat 43, renaksi 151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);
- l) membangun kemitraan dengan instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat, *patron hand, publik figure* dengan narasi yang berbasis data dan fakta;
(giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
- m) membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi public (KIP) melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang professional, transparan dan akuntabel;
(giat 3149, 3070/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 13, giat 43, renaksi 151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);

/n) meningkatkan.....

- n) meningkatkan layanan informasi publik melalui informasi melalui penyebaran/diseminasi informasi dengan media elektronik berupa dialog interaktif olehpara konsultan/pakar/professional guna pencitraan positif Polri.
(giat 3149, 3070/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 13, giat 43, renaksi 151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pemolisian prediktif serta dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemantapan penanganan Covid-19 dengan kegiatan pengamanan dan penegakkan hukum (giat yustisi) yang tegas dan profesional terhadap setiap pelanggar prokes;
(giat 3133/prog 4, 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);
 - b) peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung Tangguh Semeru (KTS) dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat yang ada dilingkungan masing-masing (giat 4343/prog 4, 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);
 - c) peningkatan pemberdayaan pengembangan kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam serta Satpam dan Polsus;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas *kegiatan FKPM/Pokdar Kamtibmas* dan pembinaan jaringan kinerja dan kemitraan (pos kamling dan bentuk pam swakarsa lainnya;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47);
 - e) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
(giat 3133,4343/prog4,5/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);

/f) memantapkan.....

- f) memantapkan keterlibatan Bhabinkamtibmas sebagai mitra positif seluruh unsur pemerintahan Desa, pendamping desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19;
(giat 5076/prog 4/SP1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47);
- g) memberdayakan Bhabinkamtibmas, polmas dan personel staf untuk bertugas sebagai tracer dalam rangka memutus mata rantai penularan covid-19;
(giat 5076/prog 4/SP1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47);
- h) pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar mengurangi mobilitas masyarakat guna mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19.
(giat 5076/prog 4/SP1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47);
- 4) penanganan Konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi Kepolisian untuk penanganan konflik sosial;
(giat 5076/prog 4/SP1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- b) peningkatan kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) melalui bantuan para ahli dalam rangka penyelesaian masalah (problem solving);
(giat 5076/prog 4/SP1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- c) membangun Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) serta Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di satuan kewilayahan secara bertahap sesuai dengan karakteristik wilayah;
(giat 5076/prog 4/SP1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- d) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas dengan meteri nilai nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65, 68);
- e) mengoptimalkan.....

- e) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55, 67).
 - f) peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Prolat dan Pembinaan petugas Polmas/Bhabinkamtibmas di SPN maupun lokasi Lemdik Lainnya;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55, 67);
 - g) kerjasama dengan Stake Holder lainnya/ Eksternal dalam membantu kegiatan Polri dalam Harkamtibmas melalui kegiatan 4 pilar pemberdayaan Toga, Tomas, Todat dan elemen masyarakat lainnya;
(giat 5076/ prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog5, giat16, renaksi 60, 64, 65, 68);
- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan sosialisasi *Indonesia Safety Driving Centre* (ISDC).
(giat 3133/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 6, giat 12, renaksi 49);
- b) meningkatkan kerjasama lintas sektoral (Dishub, Jasaraharja, dan komponen masyarakat lainnya).
(giat 3133/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- c) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lantas;
(giat 3133/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- d) meningkatkan kehadiran anggota Polri dalam kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28, renaksi 49, 107, 112);

/e) meningkatkan.....

- e) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat obvit/obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamsektibcarlantas;
(giat 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- f) merespon aduan dari masyarakat mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya penyumbatan jalan.
(giat 3133/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- 6) meningkatkan peran Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;
(giat 3072/prog 1, 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);
 - b) melakukan kerjasama (MOU) lintas sektoral dalam penyusunan SOP dengan instansi terkait mitigasi bencana dan penanganan pelayanan kesehatan serta mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas; (giat 3072/prog 1, 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);
 - c) menyiapkan personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;
(giat 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
 - d) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana;
(giat 3130, 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);

/e) memetakan....

- e) memetakan masyarakat Desa/ wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
- f) bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial dan penyaluran vaksin *Virus Covid-19* kepada masyarakat;
(giat 3072/prog 1, 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);
- g) menyiapkan tim khusus tanggap bencana rangka pemenuhan kebutuhan pokok (Dapur Lapangan), air bersih, tempat tinggal sementara dan sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana;
(giat 3130, 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- h) melaksanakan latihan peningkatan manajemen dan kemampuan personil dalam menangani bencana;
(giat 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- i) peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah;
(giat 3072/prog 1, 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);
- j) membentuk Tim Trauma Healing bagi korban bencana alam.
(giat 3130, 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- 7) penggelaran kekuatan operasional dan *back up* personel kewilayahan Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial; dan menjalin sinergitas polisional serta menangani gangguan kelompok kriminal bersenjata;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan.....

- a) melaksanakan operasi fungsi Binmas dalam rangka mengantisipasi munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55).
- b) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; (giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
- c) melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 10, giat 17, renaksi 66, 128, 132);
- d) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
(giat 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 17, renaksi 69);
- e) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- f) tergelarnya personel dikawasan obvitnas dan objek tertentu;
(giat 3131/prog 4/SP 1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107, 114, 119, 121, 122, 124, 125);
- g) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat, pelayanan pelacakan dan penangkalan;
(giat 3130, 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 19, 20, 30, renaksi 50, 74, 78, 101, 103, 120);

/h) memperkuat.....

- h) memperkuat Binmas Noken dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas.
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14 renaksi 54,55);
- i) melaksanakan latihan peningkatan kemampuan personil Polda Jatim dalam menangani unjuk rasa, konflik sosial dan insurensi. (giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
- j) meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masiv;
(giat 5076, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74,78);
- 8) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan swasta;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) inventarisasi *Memorandum of Understanding (MoU)* Polda Jatim dengan Pemda dan *Stakeholder* lainnya dalam rangka memperbarui kerjasama yang habis masa berlakunya atau dalam rangka kerjasama baru;
(giat 3122/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 22, renaksi 82, 83);
- b) meningkatkan kerjasama Polda Jatim dengan instansi terkait, BUMN maupun swasta dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(giat 3120/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 20, renaksi 78);
- c) meningkatkan kerjasama dengan BNPT dalam menjalankan program kontra radikalisme, kontra ideologi, kontra propaganda dan moderasi beragama.
(giat 3120, 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 62);
(d) meningkatkan.....

- d) meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Universitas untuk perubahan etika perilaku Polri yang melayani;
(giat 3120, 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 62).
- 9) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di wilayah industri, pariwisata guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan patroli di wilayah industry (kawasan tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka pengamanan perairan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur;
(giat 3134/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- b) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (*illegal logging, illegal fishing* dan penyalahgunaan BBM);
(giat 3134, 4342/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- c) memaksimalkan pemberdayaan kring Reskrim diwilayah perbatasan dan perairan guna maksimalkan deteksi dini terhadap aksi criminal;
(giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46).
- d) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
(giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46).
- 10) penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau terluar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun.....

- a) membangun kemampuan operasional Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan patroli (pre-emtif, preventif dan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat, 3130, 5087, 3134/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 12, 10, renaksi 48, 50, 133);
- b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau terluar;
(giat 3130, 3131, 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48, 50);
- c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pulau terluar.
(giat 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
- d) menggelar kekuatan personel Polda Jatim dalam layanan pengamanan dengan memperbanyak frekuensi keberadaan personel di semua titik area obvitnas/obyek vital tertentu;
(giat 3130, 3131, 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48, 50);
- e) memperkuat sinergi dengan para penyelenggara/ pengelola obvitnas/ obyek vital tertentu tentang fungsi sistem manajemen pengamanan;
(giat 3130, 3131, 3135/ prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48, 50);
- f) mengantisipasi adanya drone asing bawah laut.
(giat 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **" Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim"**, yaitu:

- 1) modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik yang prima;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun kewilayahan untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139).
 - b) optimalisasi aplikasi Jogo Jawa Timur untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Polres Jajaran; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139).
 - c) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek, Polres dan Polda; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, Renaksi 135, 136, 137, 139).
 - d) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (Pemprov Surabaya, Dishub Jatim, PT. Telkom, Balmon, Kominfo Kodya Surabaya dan Dinkes Prov. Jatim, BPJS Kesehatan). (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37,38, renaksi 135, 136, 137, 139).
 - e) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian; (giat 3133, 3084/prog 4, prog 2/SP 2/SS 2/IKU 2/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);
 - f) meningkatkan pengembangan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor;

/(giat.....

(giat 3133, 3084/prog 4, prog 2/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);

- g) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
(giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 13 6, 137, 139, 143);
- h) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi riil sarana prasarana atas pelayanan publik yang berbasis TIK;
(giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37,38, renaksi 135, 13 6, 137, 139).
- i) penambahan sarana dan prasarana, penguatan jaringan internet dan pemeliharaan jaringan intranet serta meningkatkan kapasitas Bandwidth di Mapolda Jatim dan Mako Polres jajaran Polda Jatim; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139).
- j) melaksanakan pembinaan teknis TIK kepada personil yang mengawaki layanan publik di masing-masing Satker dari Satwil Polres jajaran Polda Jatim.
(giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135,136, 137, 139).

- 2) peningkatan profesionalisme Polda Jatim dalam kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik serta menumbuhkan sikap petugas yang melayani;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan operator (out sourching) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS) ;
(giat 5076/prog 4/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- b) meningkatkan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;

(giat....

- (giat 3100/ prog 5/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Kepolisian pada pelayanan publik;
(giat 3084/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141,144);
- d) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara berkala dalam pelayanan pengaduan, pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam;
(giat 3072/prog 1/SP 2/SS 5/IKP 12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- e) Melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Rumkit jajaran Polda Jatim;
(giat 3072/prog 1/SP 2/SS 5/IKP 12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- f) meningkatkan pelayanan SKCK dengan system delivery bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan mendesak warga masyarakat;
(giat 3084/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- g) mewujudkan indeks profesionalisme SDM Polda Jatim meliputi pelaksanaan rekrutmen, uji kompetensi jabatan, SMK dan PPK, pemberian reward kepada personel;
(giat 3072/prog 1/SP 2/SS 5/IKP 12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- h) melaksanakan survey layanan kepuasan pe-nyalenggaraan Diklat pada pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi guna peningkatan kualitas layanan Diklat di SPN Polda Jatim.
(giat 3072/prog 1/SP 2/SS 5/IKP 12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- i) peningkatan pelayanan pada PNPP terutama pada pasien covid- 19 dengan melaksanakan 3 T (testing, tracing, treatment);
(giat 3100/prog 5/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- 3) mengoptimalkan *quick response* Kepolisian dengan standar yang kredibel dan akuntabel sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP);

/untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengelola kegiatan *quick response time* Polda Jatim dalam rangka menghadapi gangguan Kamtibmas dan unjuk rasa serta Konflik sosial dengan standar yang terukur berpedoman pada peraturan yang ada; (giat 3130/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
 - b) mengoptimalkan dukungan kedokteran kepolisian dan layanan DVI dalam rangka menghadapi gangguan kamtibmas dan unjuk rasa; (giat 3130/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
 - c) melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang berbelit-belit; (giat 4340/prog 1/SP 2/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 138, 139);
 - d) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat 5081/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 32, renaksi 123);
 - e) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (giat 3131/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi, 50, 107);
- 4) keterpaduan pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tata ruang RPK yang humanis serta berbasis TIK;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat 5062/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 40);
/b) melaksanakan.....

- b) melaksanakan audit Kinerja Proyek/Wasyek terhadap pengelolaan ruang SPKT dan tindak lanjut tata kelola RPK yang berbasis TIK secara berkala;
(giat 5060/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38);
- c) melaksanakan kajian dan evaluasi secara periodic terhadap perkembangan dalam hal pelaporan sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan Kepolisian merasa dimudahkan.
(giat 5060/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik**”, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Jatim;
(giat 4342/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
- b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
(giat 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083, prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 85, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 106);
- c) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
(giat 3143/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 5, 6, giat 16, 23, renaksi 60,61,94,95);

/d) melanjutkan.....

- d) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;
(giat 3141/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96).
- e) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat 3145/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPKprog 6,giat 23,renaksi 86, 109);
- f) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(giat 3142/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
- g) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(giat 3151/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 88);
- h) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(giat 3130/prog 4/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 92, 93, 102);
- i) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 89, 90, 108);
- j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat 23, renaksi 96);
- k) penyelenggaraan laboratorium forensik dalam rangka bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat 23, renaksi 96);
- l) memberikan bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS;
(giat 3141/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/ PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
/m) meningkatkan.....

- m) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana penegakan hukum sehingga masyarakat merasakan layanan yang bersih transparan dan akuntabel;
(giat 3141/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- n) mengadakan pelatihan dan Dikjur dalam meningkatkan kemampuan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan.
(giat 3141/ prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat 3100/prog 3/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;
(giat 3100/prog 3/SP 3/SS 3/IKP2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93, 96);
 - c) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan anggota pada kegiatan sertifikasi Gadik fungsi teknis Kepolisian dan penyidik/penyidik pembantu;
(giat 3100/prog 3/SP 3/SS 3/IKP 2/PPK prog 6, giat 23,renaksi 93, 96);
- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polda Jatim dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat 3137/prog 5/SP3/SS 2/IKU 2/PPK prog 16,giat 51,renaksi 176, 177);
(b) mengoptimalkan.....

- b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan, transparansi dan sebagai alat ukur kinerja penyidik;
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- d) melakukan kerja sama dibidang penyelidikan dan penyidikan.
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163).
- e) pemenuhan Akreditasi ISO 17025 dalam menjamin hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang berstandart Nasional dan Internasional;
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- f) mengupayakan proses pemeriksaan secara online melalui Zoom.
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162,163);
- 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data base informasi kriminal secara digital antar Satker Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim serta institusi penegak hukum lainnya yang mudah diakses oleh petugas dan masyarakat guna memudahkan identifikasi serta ungkap kasus kejahatan;
(giat 5084/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
- b) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP dan layanan publik secara online;
(giat 5084/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 99);
- c) memperkuat kerangka regulasi penegakkan hukum.
(giat 5084/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 99);

/d. Arah.....

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jatim**” yaitu:

1) peningkatan kualitas 8 standart pendidikan era *police 4.0*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempuraan kurikulum pada era police 4.0. kepada Biro Lemdiklat Polri u.p. Karokurikulum meliputi Diktuk dan Dikbang;
(giat 5070/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 14);
- b) mengusulkan dan mengikut sertakan personel Polda Jatim pada sertifikasi gadik/instruktur;
(giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4,renaksi 11,13,14);
- c) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang *Worldclass Standar*,
(giat 3100, 5076, 3130, 5087/prog 3, 4/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4 renaksi 14, 16);
- d) peningkatan kapasitas SDM bidang siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar*; (giat 3100, 3151, 3141/prog 3,5/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3,giat 4,renaksi 14);
- e) sertifikat profesi anggota Polda Jatim serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polda Jatim;
(giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 6,giat 23,renaksi 93,153);
- f) pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar*,
(giat 3100/prog 3/SP 1/SS 1/IKU 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
- g) desentralisasi pendidikan pengembangan spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Samapta;
(giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3,giat 4,renaksi 13,76,157);

/h) pelatihan.....

- h) pelatihan revolusi mental dan manajemen operasional Polsek yang *Worldclass Standar*,
(giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14, 75);
 - i) peningkatan profesionalisme SDM Polri dengan mengikutsertakan pada pelatihan IT berbasis 4.0
(giat 3100, 3151, 3141/prog 3, 5/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;
(giat 5052/prog 1/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 1, giat 1, 2, renaksi 2,3,4);
- b) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
(giat 5052/prog 1/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6,7);
- c) menindaklanjuti Perpol Nomor 3 Tahun 2019 tentang manajemen talenta Polri untuk mewujudkan kader unggul yang dapat berkompetitif;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18,19);
- d) pembinaan rohani, jasmani, dan mental bagi anggota Polda Jatim; (giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21).
- e) melaksanakan pemilihan Polisi teladan sebagai penggerak revolusi Mental dan pelopor tertib sosial di ruang Publik;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 27);
- f) melaksanakan identifikasi dan menyusun kebutuhan personel di seluruh jajaran Polda Jatim.

(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);

- 3) melaksanakan rekrutmen anggota Polri dan seleksi Dikbangum serta pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Test (CAT) berbasis TI
(giat 3107/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8,9,10, 12);
- b) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel; (giat 3107/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11);
- c) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas;
(giat 3105/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);
- d) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
(giat 3107/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11);
- e) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan personel Polda Jatim yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);
- f) optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat terkait seleksi penerimaan anggota Polri;
(giat 3100, 5076/prog 3, 4/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 16);

/g) mengembangkan....

- g) mengembangkan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa *up to date*;
(giat 3107/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11);
- h) melibatkan LSM dan instansi terkait serta pengawas internal dalam rekrutmen anggota Polri;
(giat 3107/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9, 10, 12);
- 4) peningkatan pelaksanaan tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-procurement untuk mendukung clean government;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan input data pada aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat 3084, 4339/prog 2, 5/SP 4/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - b) peningkatan kemampuan ITK satker Polda Jatim dan satker kewilayahan.
(giat 3072, 3100/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
 - c) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda Jatim melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
(giat 4341/prog 2/SP 4/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14,renaksi 54, 55);
 - d) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
(giat 3100, 4341/prog 1, 2/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 14);
 - e) membuat rencana kegiatan Polri yang berdasarkan norma dan peraturan undang-undang sehingga terwujud perencanaan yang realistik, selaras dan akuntabel;
(giat 3072, 3100/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);

- 5) pelaksanaan system manajemen karier berbasis kinerja serta penyusunan rumpun jabatan fungsional, diluar struktur dan sertifikasi profesi berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *merryt system* melalui Asesment Center;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);
- b) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi Kepolisian;
(giat 3100, 5076/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
- c) berkoordinasi instansi terkait serta pihak swasta tentang penugasan di luar struktur.
(giat 3100, 5076/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
- d) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) online dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa *up to date*;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18);
- e) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);
- f) melaksanakan system penilaian kompetensi Polri yang komprehensif melengkapi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 22);
- g) memperbanyak jumlah assessor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

(giat 3100, 5076/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);

- h) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 22);
- 6) meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan serta keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya di Polda Jatim.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS;
(giat 3105/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
- b) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat 5062, 3072, 5052/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30, 31);
- c) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes;
(giat 5052, 3072/prog 1/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38, 39);
- d) melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama;
(giat 3072/prog1/SP4/SS5/IKP12/PPK prog3, giat8, renaksi 31);
- e) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas;
(giat 3072, 3105/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30, 32);
- f) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS);

/(giat....

(giat 5052, 3072/prog 1/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38, 39);

- g) menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif secara paliatif.

(giat 3072/prog 1/SP 4/SS 5/IKP 12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31).

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "**Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan**", yaitu:

- 1) pemenuhan Sarpras dan kebutuhan perlengkapan Almatsus Polda Jatim yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim selanjutnya melaksanakan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim (Min dan Maks);
(giat 5060, 5051/prog 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);

- b) mengusulkan pengadaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim (min dan maks) dengan skala prioritas;
(giat 5060, 5051/prog 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);

- c) pendistribusian pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan ke Satker-satker di wilayah Polda Jatim berdasarkan skala prioritas;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40 renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);

- d) melakukan usulan penghapusan Almatsus yang kondisinya rusak berat;
(giat 5062, 3071/prog 1, 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);

/9e) pendistribusian.....

- e) pendistribusian pemenuhan peralatan dan materil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat 3084, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141);
- f) melaksanakan pembangunan *Indonesia Safety Driving Center*;
(giat 5062, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 12, giat 10, 41, renaksi 38,145);
- g) pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan dijalan raya;
(giat 3084, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 6, giat 23, renaksi 91);
- h) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda Jatim maupun kewilayahan untuk memberikan layanan kesehatan yang prima dalam penanganan pandemi Covid-19 kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30, 31, 118);
- i) membangun sistem komunikasi pulau terluar berpenghuni;
(giat 3084, 5055/prog 1/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 34);
- j) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat izin operasional BUJP;
(giat 3084, 3071/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54);
- k) pendistribusian pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37);
- l) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 11, giat 40, renaksi 141);

/2) peningkatan.....

- 2) peningkatan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim dan rumah dinas di wilayah pulau terluar berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
- b) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan rumah dinas;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48);
- c) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas secara selektif, prioritas dan berkelanjutan.
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48);
- d) melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan kediaman/lingkungan Mako;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- e) melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas perkantoran;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48);
- f) membangun instalansi jaringan telepon dan internet difasilitas perkantoran yang baru.
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38,48).

- 3) meningkatkan pengembangan Almatsus *Scientific Crime Investigation (SCI)*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan sarana prasarana penyelidikan dan penyidikan serta bantuan teknis yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation-SCI*);

/giat.....

- (giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- b) pengembangan Almatsus siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana siber;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- c) melengkapi peralatan laboratorium forensic dan sidik jari dengan teknologi terkini;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- d) penyelenggaraan pemeliharaan dan kalibrasi Alsus Laboratorium Forensik dalam rangka pemenuhan Akreditasi ISO 17025 yang berstandart Internasional.
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- 4) pembangunan dan penyatuan system informasi Kepolisian yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 34);
- b) meningkatkan layanan darurat/hotline Kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 1, 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 36);
- c) melaksanakan pembangunan pergudangan Polri yang modern dan terintegrasi;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38);
- d) menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi.
(giat 5059/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 34);
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik**”,yaitu:

/1) peningkatan.....

- 1) peningkatan peran Yanduan dalam rangka penanganan public komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi150);
- b) mengoptimalkan penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* (E-lapor, WhatsApp, Facebook, Instagram dan email) dengan bagian pelayanan dan pengaduan Itwasda, Bidpropam dan Bagwassidik Polda Jatim;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 149, 167);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 15, giat 49, renaksi 171, 172);
- d) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat 5086/prog 5/SP 6/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- e) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- f) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait Rekrutmen pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 4/PPK prog 15, giat 50, renaksi 175);

/g) mengoptimalkan.....

- g) mengoptimalkan Dumas Presisi melalui Posko Dumas online di Subbagdumasanwas dan melakukan asistensi kejajaran secara berkala.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 149,167).

2) penguatan saber pungli;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembangunan system pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Satgas, KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat Polda Jatim sampai dengan tingkat kewilayahan.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- c) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L, Pokja UPP, Pemda dan pihak-pihak yang terkait dalam memberantas pungli;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 166, 170);
- d) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol, SIPSS dan pendidikan pengembangan;
(giat 5086/prog 5/SP 6/SS 1/IKU 1/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- e) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);
(giat 5086/prog 5/SP 6/SS 1/IKU 1/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176,177);
- f) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polda Jatim.

/(giat.....

(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169).

- 3) pencegahan Korupsi di internal Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri;

(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);

- b) meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional.

(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170,173);

- c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal (BPKP, LSM anti korupsi dan Ombudsman perwakilan Jatim) serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi;

(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173);

- d) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;

(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);

- e) meningkatkan komitmen bersama untuk mencegah perilaku korupsi dan mengundurkan diri dari jabatan/sebagai anggota Polri jika melanggar perkara.

(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 14, giat 47, renaksi 65);

- 4) meningkatkan tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polda Jatim yang efektif, efisien dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

/a) peningkatan.....

- a) peningkatan pengendalian dan pengawasan melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker sehingga lebih efektif dan efisien dengan sistem informasi yang terintegrasi.
(giat 4339/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 15, giat 48, renaksi 113, 129, 168);
- b) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Jatim (Rancangan Renja Polda Jatim dan Renja Polda Jatim);
(giat 5051/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi168);
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri, capaian kinerja anggaran (Smart dan e-Monev Bappenas);
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 163);
- e) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
- f) melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polda Jatim secara terencana, berkesinambungan dan secara cermat guna mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan Polri.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162).
- 5) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana jajaran Polda Jatim serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan.....

- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat 5052/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10, 12/PPK prog 1, giat 1, renaksi 1, 2);
 - b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat 5052/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 1, giat 1, renaksi3);
 - c) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan jajaran Polda Jatim.
(giat 5052/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 1, giat 1, renaksi3).
- 6) peningkatan kualitas pelayanan publik pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Polda Jatim dan jajaran mempersiapkan kelengkapan dan mengikuti pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Srena Polri melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polrestabes/ Polresta/Polres dan Satker Polda Jatim;
(giat 5053/prog1/SP 6/SS 5/IKP10/PPK prog12, giat41, renaksi 146).
- b) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polda Jatim untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultansi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polda Jatim, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
(giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139,140);

/c) melanjutkan.....

- c) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polda Jatim; (giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 138, renaksi 140);
- d) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polda Jatim yang berpartisipasi; (giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 38, renaksi139, 140);
- e) mempertahankan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 39, renakasi 140);
- f) mewajibkan seluruh Satker/Satwil jajaran Polda Jatim untuk membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.
(giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 39, renakasi 140).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Malang

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat kabupaten Malang**”, yaitu:
 1. penguatan peran Polres Malang dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini) fungsi intelejen keamanan Polri yang di dukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPK prog5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);

/b) melakukan.....

- b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- c) mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial yang menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Malang meliputi konflik Sunni-Syiah, kelompok intoleran, suporter bola, Perguruan Silat dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117/prog4/SP1/SS1/ IKU1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- 2) Meningkatkan pencegahan proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemantapan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) dalam Perpolisian Masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Polsek sebagai basis deteksi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas deteksi serta pemberdayaan Bhabinkamtibmas satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan dalam Perpolisian Masyarakat;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
- b) pemberdayaan rumah rembuk yang ada di jajaran Polres Malang, selain penanganan covid-19, juga sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, terorisme, kejahatan Konvensional lainnya, dll);
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;

/(giat.....

- (giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
- d) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat 3155/prog 1/SP 1/SS 1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 51);
- e) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas dan pengamanan di tempat obvit/ obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 50, 51).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pemolisian prediktif serta dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemantapan penanganan Covid-19 dengan kegiatan patroli dan penegakkan hukum yang tegas dan profesional terhadap setiap pelanggar prokes;
(giat 3133/prog 4, 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91).
- b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam rumah rembuk dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat yang ada dilingkungan masing-masing.
(giat 4343/prog 4, 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91).
- c) peningkatan pemberdayaan pengembangan kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(Giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- d) peningkatan pemberdayaan pengembangan kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;

/(giat.....

(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);

- e) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP serta Da'i kamtibmas;
(giat 5076/prog4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12,renaksi46,47);
- 4) penanganan Konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi Kepolisian untuk penanganan konflik sosial;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- b) peningkatan kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) melalui bantuan para ahli dalam rangka penyelesaian masalah (problem solving);
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- c) membangun Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) serta Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di satuan kewilayahan secara bertahap sesuai dengan karakteristik wilayah;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- d) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadidi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat 5076/prog 4/SP1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat16, renaksi 60,4,65);
- e) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54,55).

- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;
(giat 3133, 4343/prog 4, 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91).
- b. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral (Dishub, Jasaraharja, dan komponen masyarakat lainnya).
(giat 3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- c. melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lantas;
(giat 3133/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- d. meningkatkan kehadiran anggota Polri dalam kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28, renaksi 49, 107, 112);
- e. meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat obvit/obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107).

- 6) meningkatkan peran Polres Malang di wilayah rawan gempa dan bencana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan kerjasama (MOU) lintas sektoral dalam penyusunan SOP dengan instansi terkait mitigasi bencana dan penanganan pelayanan kesehatan serta mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas;

(giat.....)

(giat 5076/prog 1, 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);

- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana;
(giat 3130, 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
 - c) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
- 7) penggelaran kekuatan operasional dan *back up* personel kewilayahan Polres Malang dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional serta menangani gangguan kelompok kriminal bersenjata;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kesiapan personel Polres Malang untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- b) melaksanakan operasi fungsi Binmas dalam rangka mengantisipasi munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55).

/c) penanggulangan.....

- c) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(giat 5080 /prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
- d) melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat 5080/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 10, giat 17, renaksi 66);
- e) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74,78);
- g) tergelarnya personel dikawasan obvitnas dan objek tertentu;
(giat 3131/prog 4/SP 1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 51, 107);
- 9) penggelaran patroli kapal Polres Malang di wilayah pariwisata guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (*illegal loging, illegal fishing* dan penyalahgunaan BBM);
(giat 3142/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- b) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
(giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "**Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polres Malang**", yaitu:

- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik yang prima;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polres untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139).
 - b) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139).
 - c) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian; (giat 3133, 3084/prog 4, prog 2/SP 2/SS 2/IKU 2/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);
 - d) meningkatkan pengembangan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor; (giat 3133, 3084/prog 4, prog 2/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);
 - e) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi. (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139).
- 1) Peningkatan profesionalisme Polri dalam kualitas pelayanan dan meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik serta menumbuhkan sikap petugas yang melayani;

/untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan secara konsisten;
(giat 5076/prog 4/SP 2/SS 4/IKP 4/PPKprog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
 - b) monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Kepolisian pada pelayanan publik;
(giat 3084/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
2. Mengoptimalkan *quick response* Kepolisian dengan standar yang kredibel dan akuntabel sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengelola kegiatan *quick response time* Polres Malang dalam rangka menghadapi gangguan Kamtibmas dan unjuk rasa serta Konflik sosial dengan standar yang terukur berpedoman pada peraturan yang ada;
(giat 3130/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
 - b) mengoptimalkan dukungan kedokteran kepolisian dan layanan DVI dalam rangka menghadapi gangguan kamtibmas dan unjuk rasa;
(giat 3130/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
 - c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;
(giat 3131/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik**”, yaitu:

- 1) peningkatan profesionalisme penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Jatim;
(giat 4342, 4344/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
 - b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
(giat 3140, 3142, 3144, 3146, prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 85, 86, 87, 88, 94, 95, 98);
 - c) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(giat 3130/prog 4/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 92, 93);
- 2) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polres Malang dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat 3137/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/ PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Malang**” yaitu:
/1) peningkatan.....

- 1) peningkatan kualitas 8 standart pendidikan era *police 4.0*;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Samapta dan Binmas yang *Worldclass Standar*,
(giat 5076, 3130 /prog 3, 4/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4 renaksi 14, 16);
 - b. pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar*,
(giat 3128/prog 3/SP 1/SS 1/IKU 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
 - c. pelatihan revolusi mental dan manajemen operasional Polsek yang *Worldclass Standar*,
(giat 3128/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
 - d. peningkatan profesionalisme SDM Polri dengan mengikutsertakan pada pelatihan IT berbasis 4.0
(giat3141/prog 3,5/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3,giat 4,renaksi14);
- 2) peningkatan pelaksanaan tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-procurement untuk mendukung kesejahteraan anggota Polres Malang;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan input data pada aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat 3084/prog 2, 5/SP 4/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - b) peningkatan kemampuan ITK Polres Malang dan Polsek jajaran.
(giat 3073/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
- 3) pelaksanaan sistem manajemen karier berbasis kinerja serta penyusunan rumpun jabatan fungsional, diluar struktur berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi Kepolisian; (giat 5076/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
 - b) berkoordinasi instansi terkait serta pihak swasta tentang penugasan di luar struktur.
(giat 5076/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
- 4) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahana (SIK 3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
(giat 5052/prog 1/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);
 - b) pembinaan rohani, jasmani, dan mental bagi anggota Polri;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21).
 - c) melaksanakan pemilihan Polisi teladan sebagai penggerak Revolusi Mental dan pelopor tertib sosial di ruang Publik;
(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan**”, yaitu:
- 1) pemenuhan Sarpras dan kebutuhan perlengkapan Almatsus Polres Malang yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

/untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polres Malang selanjutnya melaksanakan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polres Malang (Min dan Maks);
(giat 5060, 5051/ prog 4/ SP 5/ SS 4/ IKP 4/ PPK prog 4, giat 10, renaksi 37,38);
- b) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan injurensi ke Polda Jatim;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 34, 37, 38, 135, 144);
- c) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus ke Jajaran Polres Malang berdasarkan skala prioritas;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 34, 37, 38, 135, 144);
- d) mengusulkan pengadaan perlengkapan keselamatan anggota dalam situasi kontijensi;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 34, 37, 38, 135, 144);
- e) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat 5062, 3071/prog 1, 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);
- f) pendistribusian pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat 3084, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141);

/g) melaksanakan....

- g) melaksanakan pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*,
(giat 5062, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 12, giat 10, 41,
renaksi 38,145);
- h) pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan
dijalan raya;
(giat 3084, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 6, giat 23, renaksi
91);
- i) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan
kesehatan, untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada
aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,
31);
- m) pendistribusian pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan
Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah.
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37).
- 2) peningkatan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri dan pembangunan
fasilitas perkantoran di Polres Malang ;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
- a) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan
rumah dinas;
(giat 5062/prog 2/SP5/SS4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10,12,renaksi 38,48);
- b) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas
secara selektif, prioritas dan berkelanjutan.
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP4/PPKprog 4, 5, giat 10,12 renaksi 38,48);
- c) melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan
lainnya yang dekat dengan kediaman/lingkungan Mako.
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renakasi 31).
- 3) meningkatkan pengembangan Almatsus *Scientific Crime Investigation* (*SCI*);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:

/a) meningkatkan.....

- a) meningkatkan sarana prasarana penyelidikan dan penyidikan serta bantuan teknis yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation-SCI*);
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, Renaksi 39).
- b) pengembangan Almatsus siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana siber;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, Renaksi 39).
- 4) pembangunan dan penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 34);
- b) meningkatkan layanan darurat/hotline Kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 1, 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 36);
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik**”, yaitu:
- 1) peningkatan peran Yanduan dalam rangka penanganan publik komplain dan mengoptimalkan sarana aplikasi lapor secara efektif dan terpercaya berbasis online;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- b) mengoptimalkan penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* (E-lapor, WhatsApp, Facebook, Instagram dan email) dengan bagian pelayanan dan pengaduan Siwas, Sipropam Polres Malang;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 49);
(c) percepatan.....

- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 15, giat 49, renaksi 172);
 - d) memberikan kepastian hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
 - e) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait Rekrutmen pendidikan pembentukan serta terkait penangan perkara pidana dan pelayanan Publik;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 4/PPK prog 15, giat 50, renaksi 175);
- 2) penguatan saber pungli;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Satgas, KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
 - c) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
 - d) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polres Malang.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169).
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polres Malang;

/untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
 - c) meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173);
 - d) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal (BPKP, LSM anti korupsi dan Ombudsman perwakilan Jatim) serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173);
 - e) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- 4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat.....

(giat 5052/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10,12/PPK prog 1, giat 1, renaksi 1, 2);

- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat 5052/ prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 1, giat 1, renaksi 3);
- c) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan jajaran Polda Jatim.
(giat 5052/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 1, giat 1, renaksi 3).

- 5) meningkatkan tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polres Malang yang efektif, efisien dan akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengembangkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri;
(giat 3088/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38,140);
 - b) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polres Malang (Renja Polres Malang);
(giat 3088/ prog 1/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi168);
 - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP11/PPK prog14,giat47,renaksi 163);
 - e) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
 - f) melaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polres Malang secara terencana, berkesinambungan dan secara cermat;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);

/g) melaksanakan.....

- g) melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan negara kepada Satker jajaran Polda Jatim guna mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan Polri.
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
- 6) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Polda Jatim dan jajaran mempersiapkan kelengkapan dan mengikuti pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Srena Polri melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polrestabes/ Polresta/ Polres dan Satker Polda Jatim;
(giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP10/PPK prog 12, giat 41, renaksi 146).
- b) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polres Malang untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polres Malang, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
(giat 5053/ prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
- c) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres Malang, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polda Jatim;
(giat 5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 138, renaksi 140);
(d) melakukan.....

- d) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polda Jatim yang berpartisipasi;
(giat 5053/ prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);

- e) mempertahankan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat 5053/ prog 1/ SP 6/ SS 5/ IKP 10/PPK prog 11, giat 39, renakasi 140);

d) **PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU IDEAL TA. 2024**

1. Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan.

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana Narkoba;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana perairan;
- g) penindakan tindak pidana lalu lintas.

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri;
- b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
- c) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemptif dan preventif.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) analisis keamanan;
- c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- d) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
- g) kerja sama keamanan dan ketertiban K/L;
- h) pembinaan pelayanan fungsi Samapta;
- i) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
- k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan;
- l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
- m) pembinaan potensi keamanan;
- n) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
- o) pengendalian operasi kepolisian;
- p) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
- q) penanggulangan keamanan dalam negeri;
- r) penyelenggaraan harkamtibmas dalam rangka pelaksanaan Pilkada / Pemilu 2024;

/d. Program.....

d. Program Dukungan Manajemen;

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) pelayanan administrasi keuangan Polri;
- c) penerangan masyarakat;
- d) penyelenggaraan teknologi informasi;
- e) pelayanan kesehatan Polri;
- f) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- g) pengelolaan multimedia;
- h) penyusunan kebijakan Polri;
- i) manajemen anggaran;
- j) pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- k) pertanggungjawaban profesi;
- l) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- m) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- n) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
- o) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- p) penyusunan dan penyuluhan hukum;

2. Pagu Indikatif Polres Malang T.A. 2024

- a. kebutuhan anggaran Polres Malang T.A. 2024 sebesar Rp. 133,058,434,000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

/1) rincian.....

1) rincian Pagu Indikatif Polres Malang T.A. 2024 per Jenis Belanja sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai : Rp. 93,423,132,000,-
- b) Belanja Barang : Rp. 39.635.302.000,-
- c) Belanja Modal : Rp. -

2) rincian Pagu indikatif T.A. 2024 per sumber anggaran sebagai berikut:

- a) Rupiah Murni : Rp. 127.076.768.000,-
- b) PNBP : Rp. 5.981.666.000,-
- c) BLU : Rp. -

3) Rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per Program sebagai berikut:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 4,103,807,000,-;
- b) modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 13,415,457,000,-;
- c) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 20,739,052,000,-;
- d) dukungan manajemen Rp. 94,800,118,000,-.

b. kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polres Malang T.A. 2024

- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, rekrutmen anggota Polres Malang T.A. 2024;
- 2) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan perawatan *Command Center*, kebutuhan *werving* Diktuk daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
- 3) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan

siber, penegakan hukum lainnya dan penanganan Covid-19 serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas Nasional Tahun 2024;

- 4) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjenji, pemenuhan fasilitas Polri dan pemenuhan fasilitas Brimob serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polri;
- 5) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin Promoter dan Presisi;
- 6) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- 7) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat pusat maupun kewilayahan;
- 8) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Malang;
- 9) melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polres Malang serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polres Malang maupun keluarga Polres Malang;
- 10) mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri yang terdiri dari:
 - a) penataan kelembagaan;
 - b) perubahan sistem dan metode organisasi;
 - c) menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
 - d) perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police 4.0*;
 - e) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;

/f) peningkatan.....

- f) peningkatan kinerja penegakkan hukum;
- g) pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC);
- h) pemulihan ekonomi nasional (PEN);
- i) menjamin keamanan dan program prioritas nasional;
- j) penguatan penanganan konflik sosial;
- k) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
- l) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi;
- m) pemantapan komunikasi publik;
- n) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
- o) penguatan fungsi pengawasan;
- p) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*public complaint*).

V. PENUTUP.

Demikian Rencana Kerja Polres Malang T.A. 2024 ini disusun sebagai pedoman Kasatker dan Kasubsatker jajaran Polres Malang dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan kegiatan Polres Malang T.A. 2024.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MALANG

9 NOMOR : KEP/ 45 / VI / 2023

TANGGAL : 3 Juni 2023